

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam tata kelola organisasi modern khususnya organisasi publik atau pemerintahan, anggaran memiliki peran sentral sebagai alat untuk merencanakan dan mengendalikan aktivitas organisasi (Ho, 2018; Black, 2019, dan Schiff & Lewin, 2019). Selain itu, pada dekade terakhir anggaran pada organisasi publik atau pemerintah juga telah berkembang menjadi instrumen untuk mendukung agenda pelestarian lingkungan (Smith et al., 2016; Persson et al., 2016, dan Brugmann, 2021).

Perkembangan fungsi anggaran tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran terhadap isu lingkungan pada berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*), khususnya pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Kesadaran tersebut mengarahkan para stakeholder untuk memindahkan sebagian anggaran dari satu fokus isu ke fokus isu yang lain (V.O Key, dalam Syarifuddin, 2011), dalam hal ini dari isu pemerintahan ke isu lingkungan. Dalam kacamata teori politik, hal tersebut tidak terlepas dari anggaran sebagai bagian dari permainan politik (Wildavsky, 2004).

Para stakeholder menyadari pentingnya peran organisasi pemerintahan dalam menjaga lingkungan hidup dan menyusun langkah-langkah yang dapat diambil oleh organisasi agar tidak hanya memperhitungkan keuntungan ekonomi semata, tetapi juga dampak lingkungan yang dihasilkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fungsi anggaran telah berevolusi dari sekedar alat administrasi keuangan menjadi instrumen yang mendukung upaya pelestarian lingkungan

Burritt, 2017).



Penerapan anggaran sebagai instrumen pelestarian lingkungan telah memunculkan suatu konsep dan agenda yang dikenal sebagai *green budgeting*. Konsep tersebut menekankan penggunaan anggaran publik untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim (Antal & Bergh, 2016). Melalui *green budgeting*, pemerintah mengalokasikan dana untuk program-program yang berkontribusi pada pelestarian lingkungan, seperti pengembangan energi terbarukan, konservasi sumber daya alam, atau pengendalian emisi gas rumah kaca (Pinz et al., 2021).

Green budgeting adalah pendekatan dalam pengelolaan keuangan publik yang bertujuan untuk memperhitungkan dampak lingkungan dan iklim dari keputusan keuangan pemerintah (*European Commission*, 2022) dan mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam proses perencanaan, alokasi, dan pengawasan sumber daya keuangan publik (Downes et al., 2017). Hal tersebut berarti *green budgeting* mempertimbangkan dampak lingkungan dari keputusan keuangan dalam rangka mencapai tujuan pelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Dengan demikian, *green budgeting* tidak hanya memperhitungkan aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga menilai dampak lingkungan dari setiap langkah keuangan yang diambil oleh pemerintah.

Pendekatan *green budgeting* melibatkan penggunaan alat-alat kebijakan anggaran untuk mendukung tujuan kebijakan lingkungan dan iklim, seperti alokasi dana untuk proyek-proyek yang mendukung energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengendalian emisi gas rumah kaca, dan pengembangan infrastruktur hijau. Selain itu, *green budgeting* juga mencakup pemantauan dan pelaporan terkait dampak lingkungan dari setiap kegiatan yang



oleh anggaran publik, sehingga memungkinkan transparansi, itas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan al., 2023).

Gagasan *green budgeting* pertama kali muncul pada awal tahun 90an seiring dengan diperkenalkannya konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) oleh lembaga-lembaga internasional (Gazzola et al., 2019). Ketika perubahan iklim semakin nyata, pemimpin dunia mulai memperhatikan isu-isu lingkungan, termasuk dalam konteks pengelolaan keuangan publik. Isu tersebut kemudian didorong kedalam organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi (*Organisation for Economic Co-operation and Development / OECD*) sebagai salah satu isu utama dalam agenda pertemuan negara - negara anggota OECD. Sebagai respons terhadap perubahan lingkungan yang semakin serius, *green budgeting* menjadi semakin relevan dan mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memiliki peran penting dalam mempromosikan *green budgeting* di tingkat global. Pada tahun 2017, OECD mengembangkan kerangka kerja strategis yang menjadi pedoman bagi negara-negara anggotanya dalam penerapan dan kebijakan *green budgeting*. Kerangka kerja tersebut dikenal sebagai *Paris Collaborative on Green Budgeting - OECD Green Budgeting Framework*. Kerangka kerja strategis tersebut terdiri dari empat blok bangunan (*building block*) yang dirancang untuk mengoptimalkan dukungan anggaran untuk program pelestarian lingkungan.

Blok pertama mencakup perumusan kerangka kerja strategis yang kuat. Hal tersebut menekankan pentingnya menetapkan prioritas dan tujuan strategis yang jelas dalam hal lingkungan dan iklim. Blok kedua mencakup instrument untuk mengukur bukti dan kebijakan anggaran. Hal tersebut membantu dalam mengumpulkan data dan bukti tentang dampak kebijakan anggaran terhadap



an dan iklim. Selanjutnya, ada blok pelaporan yang memadai kepada u kepentingan sebagai fasilitator akuntabilitas dan transparansi, yang kan pentingnya pelaporan yang jelas dan terbuka kepada semua pihak

terkait, termasuk pemerintah dan masyarakat sipil. Terakhir, ada tata kelola anggaran yang mendukung penganggaran ramah lingkungan, yang menekankan pentingnya sistem pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien untuk mendukung program-program pelestarian lingkungan.

Implementasi *green budgeting* berdasarkan kerangka kerja OECD telah menjadi fokus bagi banyak negara di seluruh dunia, terutama di Eropa. Penelitian oleh Halil (2022) mencatat bahwa kerangka kerja OECD telah menjadi landasan yang kuat bagi kebijakan anggaran berbasis lingkungan di negara-negara seperti Italia dan Prancis. Studi lain oleh Kim et al. (2014) menunjukkan bahwa di negara-negara anggota OECD, program-program hijau yang dibiayai melalui anggaran mengalami pertumbuhan yang signifikan, khususnya setelah kerangka kerja OECD dirumuskan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adopsi kerangka kerja *OECD green budgeting* memiliki potensi untuk memberikan dorongan signifikan bagi negara-negara anggota untuk lebih memperhatikan pelestarian lingkungan dalam pengelolaan anggaran.

Dalam konteks global tersebut, **Indonesia yang secara resmi menjadi anggota OECD pada tahun 2024** menandai komitmen nasional untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dan regulasi publik dengan standar internasional, termasuk dalam hal implementasi *green budgeting*. Walaupun praktik alokasi anggaran untuk program hijau telah berjalan secara sporadis di beberapa daerah sejak satu dekade terakhir, belum terdapat panduan strategis yang sistematis berbasis kerangka OECD. Hal ini menyebabkan pendekatan kebijakan lingkungan masih sangat tergantung pada visi kepala daerah atau tekanan aktor eksternal seperti LSM lingkungan.



Di tingkat pemerintah daerah, alokasi anggaran untuk program-program sanya diatur melalui kebijakan kepala daerah yang didorong oleh daerah (Perda). Dengan demikian, meskipun Indonesia belum

sepenuhnya terlibat dalam kerangka kerja *OECD Green budgeting Framework*, langkah-langkah independen telah diambil untuk memasukkan aspek lingkungan ke dalam pengelolaan anggaran, hal ini menunjukkan komitmen terhadap pelestarian lingkungan di tingkat nasional dan lokal.

Namun demikian, permasalahan dalam implementasi *green budgeting* pada konteks pemerintah, terutama pemerintah daerah, adalah ketiadaan kerangka strategis yang dapat menjadi panduan dalam menerapkan kebijakan *green budgeting*. Karena tidak adanya panduan yang jelas, penerapan *green budgeting* dapat bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Kondisi ini menimbulkan ketergantungan yang tinggi pada kebijakan dan kepedulian kepala daerah terhadap masalah lingkungan. Dengan kata lain, tingkat kesuksesan implementasi *green budgeting* di pemerintah daerah sangat bergantung pada tingkat perhatian dan komitmen dari kepala daerah tersebut (Kurniawan et al., 2020 & Hariyati, 2020).

Ketergantungan semacam ini dapat menghambat efektivitas dan efisiensi penerapan *green budgeting*, khususnya pada di tingkat pemerintah daerah. Oleh karena itu, keanggotaan Indonesia dalam OECD menjadi sebuah momentum penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan anggaran pemerintah daerah pada isu lingkungan dengan menggunakan kerangka kerja strategis yang ditetapkan oleh OECD sebagai panduan dan acuan pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan *green budgeting* secara lebih efektif dan efisien.

Selain itu tidak ada arah yang jelas pada isu apa kebijakan dan program – program lingkungan pemerintah daerah dijalankan. Sampai saat ini, kebijakan dan program lingkungan pemerintah daerah kebanyakan merupakan hasil

inngan dari organisasi non profit (NGO) yang banyak bekerja pada isu lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan dan program lingkungan pada konteks



pemerintah daerah tidak berangkat pada suatu kerangka kerja teoritis yang dapat berdampak signifikan pada perbaikan tata kelola lingkungan dan sosial.

Kerangka *OECD Green Budgeting Framework* mencakup empat *building blocks*, yakni: (1) *Strong Strategic Framework*; (2) *Tools For Evidence Generation and Policy Coherence (Tools and Methods)*; (3) *Reporting To Facilitate Accountability and Transparency*; dan (4) *An Enabling Budgetary Governance Framework*. Meskipun keseluruhan kerangka tersebut membentuk satu sistem utuh dalam implementasi *green budgeting*, penelitian ini secara khusus hanya memfokuskan kajian pada dua blok pertama, yaitu *Strong Strategic Framework* dan *Tools For Evidence Generation and Policy Coherence (Tools and Methods)*.

Pemilihan fokus ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dua *building block* awal merupakan pondasi utama dalam proses formulasi dan pengintegrasian kebijakan lingkungan ke dalam sistem penganggaran publik. *Strategic Framework* memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana arah kebijakan pembangunan daerah telah memuat visi dan tujuan lingkungan secara eksplisit. Sementara itu, *Tools and Methods* berkaitan langsung dengan pendekatan teknis yang digunakan dalam merancang, menilai, dan mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan.

Adapun dua *building block* lainnya lebih bersifat lanjutan, berfokus pada tahap evaluasi dan kelembagaan, yang umumnya relevan setelah tahap integrasi strategis dan teknis tercapai secara memadai. Dalam konteks Kabupaten Toraja Utara, pendekatan *green budgeting* masih berada pada tahap awal sehingga kajian pada aspek perencanaan strategis dan metode teknis menjadi lebih relevan



desak untuk ditelaah secara mendalam. Oleh karena itu, pembatasan pada dua blok ini bukan semata-mata untuk menyederhanakan kajian, tetapi untuk memberikan kontribusi yang lebih tajam terhadap penguatan

kapasitas dasar pemerintah daerah dalam menerapkan *green budgeting* secara kontekstual.

Tabel 1.1 Fokus Penelitian

No	Building Block	Deskripsi Singkat	Status dalam Penelitian
1	Strong Strategic Framework	Menilai sejauh mana strategi dan visi lingkungan diintegrasikan dalam kebijakan.	✓ Fokus utama
2	Tools For Evidence Generation and Policy Coherence	Alat analisis dan pendekatan teknis untuk mendukung perencanaan dan anggaran.	✓ Fokus utama
3	Reporting To Facilitate Accountability and Transparency	Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas hasil dan dampak anggaran hijau.	✗ Di luar fokus
4	An Enabling Budgetary Governance Framework	Struktur kelembagaan, peran aktor, dan sistem tata kelola implementasi.	✗ Di luar fokus

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini menggunakan analisis konten sebagai pendekatan penelitian. Analisis konten merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis isi teks secara mendalam. Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami makna, pola, dan tema yang terkandung dalam teks, baik itu dalam bentuk tulisan, dokumen, wawancara, atau materi lainnya (Mayring, 2015). Metode analisis konten sangat berguna dalam penelitian yang ingin mengungkap konteks, pandangan, atau persepsi yang terdapat dalam suatu teks tertulis (Kleinheksel, 2020).

Metode analisis konten digunakan untuk menganalisis berbagai dokumen terkait, seperti peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup, dokumen kebijakan pembangunan nasional, dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), dokumen rencana strategis pemerintah daerah (RENSTRA), dan dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Tujuan dari telaah tersebut adalah untuk mendapatkan data terkait kebijakan dan alokasi



anggaran untuk selanjutnya dianalisis dengan kerangka kerja startegis OECD sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya.

Metode analisis konten yang digunakan mengacu pada Krippendorff (2004), yang merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menganalisis isi teks secara sistematis. Pendekatan ini dikembangkan oleh *Klaus Krippendorff*, seorang ahli komunikasi, dan sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu seperti ilmu sosial, ilmu politik, ilmu komunikasi, dan sebagainya.

Analisis konten Krippendorff (2004), terdiri tiga alat analisis utama, yaitu analisis isi semantik yang membantu dalam memahami makna dan signifikansi kata-kata atau frasa yang digunakan dalam dokumen-dokumen tersebut. Analisis ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kerangka konseptual atau konsep dasar yang digunakan pemerintah daerah dalam alokasi anggaran, khususnya anggaran untuk lingkungan.

Kedua analisis isi pragmatik yang menyoroti bagaimana pesan-pesan tertentu dalam teks dapat memengaruhi tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Analisis pragmatik memungkinkan peneliti untuk memahami keterkaitan pemahaman dasar pemerintah daerah terkait isu lingkungan dengan kebijakan anggaran yang diambil.

Ketiga, analisis isi sarana tanda yang menyoroti penggunaan simbol atau representasi visual dalam teks, seperti gambar atau grafik. Evaluasi terhadap penggunaan simbol-simbol ini membantu dalam memahami bagaimana informasi visual dapat mendukung atau mengkomunikasikan pesan-pesan tertentu tentang program-program lingkungan. Melalui analisis sarana tanda, peneliti dapat

identifikasi kecendrungan pemerintah daerah terhadap tanda yang
n dalam alokasi anggaran.



Dengan menggunakan ketiga aspek analisis konten tersebut, peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang berbagai aspek teks terkait dengan *green budgeting* dalam alokasi anggaran pemerintah daerah di Indonesia. Dengan demikian, analisis konten menjadi alat yang berharga dalam mendukung perumusan kebijakan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di tingkat lokal.

Adapun lokus penelitian ini adalah Kabupaten Toraja Utara. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik pembangunan yang berbeda-beda di setiap daerah, yang didasarkan pada ciri khas dan kebutuhan masing-masing wilayah. Kabupaten Toraja Utara sebagai destinasi wisata terkenal, memiliki fokus pembangunan yang lebih terpusat pada infrastruktur dan sarana pariwisata guna mendukung pertumbuhan sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah tersebut.

Penelitian ini mengkonstruksi strategi implementasi *green budgeting* di Kabupaten Toraja Utara berdasarkan pada karakteristik pembangunan yang ada. Hal ini penting karena setiap daerah memiliki tantangan dan prioritas pembangunan yang berbeda, sehingga pendekatan *green budgeting* yang efektif harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah. Dengan memahami bagaimana konstruksi strategi implementasi *green budgeting* diterapkan dalam konteks pembangunan yang beragam, penelitian ini akan memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kebijakan lingkungan dapat diintegrasikan dengan baik dalam proses pembangunan di tingkat daerah.

1.2 Fokus Penelitian



am era tata kelola organisasi modern, anggaran memiliki peran yang penting, tidak hanya sebagai alat administrasi keuangan, tetapi juga instrumen untuk mendukung agenda pelestarian lingkungan.

Pertumbuhan kesadaran akan isu lingkungan telah mendorong organisasi, baik di sektor swasta maupun publik, untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dalam setiap keputusan keuangan yang diambil. Di tengah tuntutan masyarakat akan keberlanjutan lingkungan, konsep *green budgeting* muncul sebagai pendekatan yang menekankan penggunaan anggaran publik untuk mendukung pelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim.

Meskipun isu *green budgeting* telah menjadi topik perbincangan di kalangan akademisi dan praktisi lingkungan di Indonesia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di tingkat pemerintah daerah. Salah satu kendala utama adalah ketiadaan kerangka strategis yang jelas sebagai panduan dalam menerapkan kebijakan *green budgeting*. Tanpa panduan yang kuat, penerapan kebijakan ini cenderung bergantung pada inisiatif kepala daerah dan dapat bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Penelitian ini secara khusus difokuskan pada **Kabupaten Toraja Utara**, dengan tujuan untuk mendalami kondisi eksisting pelaksanaan *green budgeting* dan menyusun strategi implementasi berbasis kerangka kerja OECD yang disesuaikan dengan karakteristik lokal. Fokus kajian diarahkan pada evaluasi terhadap dokumen anggaran dan kebijakan daerah, identifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta konstruksi strategi yang relevan dengan konteks sosial dan ekonomi daerah tersebut.

Selain mengacu pada kerangka OECD, penelitian ini juga mempertimbangkan karakteristik lokal, termasuk nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat Toraja, sebagai konteks sosial yang potensial mendukung atau menghambat internalisasi prinsip keberlanjutan dalam penganggaran.



Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pertanyaan penelitian yang dikembangkan adalah: **"Bagaimana konstruksi strategi implementasi *green budgeting* dalam kebijakan anggaran berdasarkan analisis konten pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara?"**

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap **konstruksi strategi implementasi *green budgeting*** dalam kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, dengan mempertimbangkan karakteristik pembangunan daerah yang khas. Kabupaten Toraja Utara dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki fokus pembangunan yang bertumpu pada sektor pariwisata, sehingga berpotensi menghadirkan dinamika khusus dalam integrasi kebijakan lingkungan ke dalam proses penganggaran.

Dengan mengkaji dokumen perencanaan dan anggaran, serta merujuk pada kerangka kerja *green budgeting* OECD, penelitian ini diarahkan untuk:

1. Mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip *green budgeting* telah diadopsi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
2. Menganalisis kesesuaian antara strategi pembangunan daerah dan prinsip keberlanjutan lingkungan.
3. Menyusun strategi implementasi *green budgeting* yang kontekstual dan aplikatif bagi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis



Sebagai teoritis, penelitian ini memiliki beberapa kegunaan yang signifikan. Kontribusinya terhadap literatur akademis di bidang *green budgeting* melengkapi pemahaman tentang bagaimana konsep ini diterapkan dalam

konteks pemerintah daerah di Indonesia. Dengan menggali implementasi *green budgeting* sesuai dengan karakteristik pembangunan yang ada, penelitian ini dapat menyumbangkan wawasan baru yang relevan. Kedua, temuan dari penelitian ini berpotensi untuk mengembangkan teori dan kerangka konseptual yang lebih komprehensif. Analisis terhadap praktik *green budgeting* dalam konteks lokal dapat menjadi dasar untuk menyusun model atau kerangka konseptual yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Selain itu, secara praktis, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pembuat kebijakan, praktisi, dan pemangku kepentingan tentang penerapan *green budgeting* dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini dapat memberikan panduan yang berharga bagi mereka yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan fiskal berkelanjutan. Terakhir, penelitian ini juga memiliki potensi untuk memberikan masukan yang berharga bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, secara teoritis, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan pengetahuan tentang *green budgeting* serta meningkatkan pemahaman dan praktik pengelolaan keuangan berkelanjutan di tingkat daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki beberapa kegunaan yang dapat memberikan dampak nyata dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Pertama, temuan dari penelitian ini dapat memberikan panduan yang berharga bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran secara lebih efektif dan efisien untuk mendukung



...pembangunan berkelanjutan. Dengan memahami strategi implementasi *green budgeting*, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat

diterapkan dalam konteks mereka sendiri. Hal ini dapat membantu untuk mengarahkan sumber daya keuangan menuju program-program yang lebih berdampak dalam pelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim.

Kedua, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi di berbagai sektor, termasuk organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta yang terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan. Dengan memahami bagaimana *green budgeting* diterapkan dalam konteks pemerintah daerah, para praktisi ini dapat berperan dalam mendukung dan memperkuat implementasi *green budgeting* melalui keterlibatan mereka dalam advokasi, kerjasama proyek, atau dukungan teknis.

Ketiga, penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran pemerintah daerah. Dengan memahami bagaimana kebijakan dan praktik *green budgeting* mempengaruhi pembangunan lokal, masyarakat dapat lebih terlibat dalam pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran daerah. Hal ini dapat meningkatkan kontrol sosial dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat dipertimbangkan dalam setiap keputusan pengelolaan keuangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ditulis dalam delapan bab, yang terdiri dari bab pertama pendahuluan. Bab kedua tinjauan teoritis dan bab ketiga metode penelitian. Pada bab pertama, peneliti menjelaskan latar belakang penelitian yang mencakup konteks pentingnya pengelolaan anggaran dalam mendukung pembangunan

utan, khususnya dalam konteks pemerintah daerah di Indonesia. Bab ini dimulai dengan memaparkan evolusi peran anggaran dari sekadar administrasi keuangan menjadi instrumen yang mendukung upaya pelestarian



lingkungan, dengan merujuk pada isu-isu global seperti perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, peneliti menjelaskan pentingnya *green budgeting* sebagai pendekatan dalam pengelolaan keuangan publik yang bertujuan untuk memperhitungkan dampak lingkungan dan iklim dari keputusan keuangan pemerintah.

Bab kedua dari penelitian ini adalah tinjauan teoritis yang mendalam mengenai konsep *green budgeting*, kerangka kerja OECD *Green budgeting Framework*, serta karakteristik dan tantangan dalam implementasi *green budgeting* di tingkat pemerintah daerah. Tinjauan teoritis dimulai dengan pembahasan konsep *green budgeting* sebagai pendekatan dalam pengelolaan keuangan publik yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam proses perencanaan, alokasi, dan pengawasan sumber daya keuangan publik. Penjelasan tentang tujuan dan prinsip-prinsip utama dari *green budgeting* menjadi fokus utama dalam bab ini.

Bab ketiga dari penelitian ini adalah metode penelitian yang akan digunakan dalam menjalankan studi ini secara efektif dan efisien. Metode penelitian yang dipilih adalah kualitatif dengan pendekatan konten analisis, sesuai dengan kompleksitas dan ruang lingkup penelitian tentang implementasi *green budgeting* di tingkat pemerintah daerah. Menggunakan triangulasi data yaitu kombinasi dokumentasi, kajian literatur, dan wawancara mendalam untuk meningkatkan kredibilitas dan konfirmasi silang antar temuan. Bab ketiga ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana penelitian ini akan dilakukan secara praktis, mulai dari pengumpulan data hingga analisis dan interpretasi hasil. Dengan demikian, bab ini diharapkan dapat memberikan

yang komprehensif bagi peneliti dan pembaca untuk menjalankan penelitian ini dengan tepat dan efisien.



Bab keempat dari penelitian ini adalah penerapan *green budgeting* di Eropa. Secara umum bab ini membahas penerapan *green budgeting* di Eropa, dimulai dari munculnya kesadaran global akan krisis iklim yang mendesak tindakan kolaboratif antara pemerintah dan sektor publik. *Green budgeting* adalah upaya integrasi keuangan publik dengan isu lingkungan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim. Konsep ini mulai dikenal pada awal 2000-an dan diadopsi oleh beberapa negara Eropa seperti Perancis dan Italia, yang kemudian mendapat dorongan dari OECD antara tahun 2010 dan 2015.

Bab kelima dari penelitian ini adalah *framework* strategis dalam OECD *green budgeting*. Bab ini mengevaluasi penerapan *frameworks* dalam dokumen penganggaran di Kabupaten Toraja Utara. Pendekatan yang digunakan adalah analisis konten dari Krippendorff, yang memungkinkan identifikasi tema, pola, dan makna dalam dokumen kebijakan. Analisis ini mencakup tiga dimensi utama. Pertama, analisis semantik digunakan untuk memahami makna terminologi yang digunakan dalam dokumen terkait isu lingkungan dan keberlanjutan. Kedua, analisis pragmatik mengevaluasi bagaimana bahasa dalam dokumen digunakan untuk tujuan tertentu, termasuk apakah bahasa tersebut berfungsi sebagai alat komunikasi strategis yang mendukung implementasi *framework*. Ketiga, analisis sarana tanda menyoroti representasi visual, seperti tabel dan grafik, serta struktur dokumen yang digunakan untuk menyampaikan informasi terkait kerangka kerja strategis.

Bab keenam dari penelitian ini adalah penerapan metode dan alat dalam kerangka OECD. Bab ini bertujuan untuk menganalisis penerapan alat dan metode yang digunakan dalam *green budgeting* di Kabupaten Toraja Utara serta

kan bagaimana program-program lingkungan yang dilakukan oleh ah daerah, yaitu; pengelolaan **ruang terbuka hijau, pengendalian**



pencemaran, rehabilitasi kawasan sensitif, serta pengelolaan sumber daya alam dan limbah domestik.

Bab ketujuh adalah konstruksi strategi implementasi *green budgeting* di Kabupaten Toraja Utara. Bab ini bertujuan untuk menganalisis kondisi eksisting implementasi *green budgeting* di Toraja Utara dengan mengacu pada *framework* OECD dan pengalaman internasional, serta menyusun strategi implementasi yang berbasis pada regulasi daerah dan optimalisasi instrumen kebijakan fiskal. Selain itu, bab ini menawarkan rekomendasi konkret untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran berbasis keberlanjutan.

Bab kedelapan dari penelitian ini adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan. Penelitian ini menyoroti implementasi ***green budgeting*** dalam kebijakan fiskal daerah dengan fokus pada Kabupaten Toraja Utara, sebagai bagian dari upaya integrasi keberlanjutan lingkungan dalam perencanaan dan penganggaran publik. Dalam konteks ini, ***green budgeting*** bukan sekadar mekanisme alokasi anggaran, tetapi juga instrumen penting untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal mendukung mitigasi perubahan iklim, konservasi sumber daya alam, serta pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan.



BAB II

MEMAHAMI *GREEN BUDGETING* MELALUI ANALISIS KONTEN

2.1 *Green budgeting* dan *Sustainability Development*

Green budgeting pada dasarnya turunan dari konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), yang merupakan gerakan global dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang. SDGs diperkenalkan sebagai reaksi terhadap tantangan global, termasuk perubahan iklim, kemiskinan, dan ketidaksetaraan, yang memerlukan respons yang holistik dan berkelanjutan (Blanch, dkk. 2023). Tujuan utama dari SDGs adalah untuk memastikan bahwa setiap negara dan masyarakat memperjuangkan pembangunan yang memperhatikan kebutuhan generasi masa depan tanpa mengorbankan kebutuhan generasi saat ini (Hajian & Kashani, 2021).

Dalam konteks *green budgeting*, prinsip-prinsip SDGs menjadi landasan untuk mengarahkan alokasi anggaran pemerintah menuju tujuan-tujuan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini mencakup penggunaan anggaran publik untuk mendukung program-program yang dapat memperbaiki kualitas lingkungan, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mempromosikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan (Hidayati, dkk. 2022). Dengan memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam proses perencanaan anggaran, *green budgeting* dapat menciptakan kesinambungan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Implementasi *green budgeting* menghadapi beberapa permasalahan yang harus diatasi agar dapat efektif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sachs, dkk. 2019). Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya informasi sumber daya dan kekurangan data yang diperlukan untuk melakukan



evaluasi yang komprehensif terhadap dampak lingkungan dari kebijakan dan proyek yang diusulkan (Wang, dkk. 2019). Selain itu, masih terdapat tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip *green budgeting* ke dalam sistem anggaran yang sudah ada, yang sering kali didominasi oleh pertimbangan ekonomi dan politik (Cahyani, dkk. 2023).

Ada juga tantangan dalam membangun kesadaran dan keterlibatan aktor-aktor penting, termasuk masyarakat sipil, sektor swasta, dan pemerintah daerah, dalam proses perencanaan dan implementasi *green budgeting* (Buijs, dkk. 2019). Diperlukan upaya yang lebih besar dalam mengedukasi dan memberdayakan semua pihak yang terlibat untuk memahami pentingnya pembangunan berkelanjutan dan bagaimana kontribusi mereka dapat membentuk kebijakan dan praktik yang lebih ramah lingkungan.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, konsep *green budgeting* menawarkan potensi besar untuk menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan (Cahyani, dkk. 2023). Dengan memperhitungkan aspek lingkungan dalam setiap keputusan anggaran, pemerintah dapat memastikan bahwa investasi publik mendukung visi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan planet ini bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan dan memperkuat praktik *green budgeting* sebagai bagian integral dari upaya global untuk mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Isu *green budgeting* pada dasarnya relatif baru dalam gerakan lingkungan secara global. Sebelum itu, lebih dikenal gagasan *green economic*. Konsep tersebut mengacu pada upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang utan dan ramah lingkungan. Konsep ini merupakan turunan dari *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip lingkungan ke dalam kegiatan ekonomi agar dapat mendukung



pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks *green economic*, prioritas diberikan pada pengembangan industri dan sektor ekonomi yang menghasilkan pertumbuhan yang tinggi secara ekonomi namun minim dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini mencakup promosi teknologi bersih, energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan praktik-praktik produksi yang berkelanjutan (Cato, 2012).

Namun demikian, terdapat kelemahan secara konseptual dan aplikatif yang menghambat perkembangan gagasan tersebut. Salah satu kelemahan utama yang menghambat perkembangan *green economy* adalah kurangnya insentif finansial yang mendorong industri dan perusahaan untuk beralih ke praktik-produksi yang lebih ramah lingkungan. Keterbatasan sumber daya keuangan juga menjadi kendala utama dalam mewujudkan inisiatif hijau, seperti pengembangan energi terbarukan atau program pengurangan emisi.

Selain itu, ketidakpastian politik sering kali membuat para pemangku kepentingan ragu untuk melakukan investasi jangka panjang dalam proyek-proyek yang berkelanjutan. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari *green economy* juga merupakan faktor penghambat lainnya, begitu juga dengan kekurangan infrastruktur dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung praktik-produksi yang berkelanjutan (Lorek & Spangenberg, 2014).

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan suatu konsep yang langsung terkait dengan pengambil keputusan inti di tingkat pemerintah. Oleh karena itu *green budgeting* didorong untuk menjawab tantangan tersebut. Dengan memasukkan aspek-aspek lingkungan ke dalam proses perencanaan dan alokasi

di pemerintah, *green budgeting* memberikan landasan yang kuat bagi penetapan kebijakan pelestarian lingkungan. Hal tersebut mencakup alokasi sumber daya keuangan untuk mendukung program-program



perlindungan lingkungan, pengembangan teknologi hijau, dan promosi penggunaan energi terbarukan.

Secara konseptual, *green budgeting* adalah pendekatan dalam pengelolaan anggaran yang bertujuan untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam proses perencanaan, alokasi, dan pengawasan sumber daya keuangan publik (Downes, Trapp & Nicol, 2017). Hal tersebut berarti mempertimbangkan dampak lingkungan dari keputusan keuangan dalam rangka mencapai tujuan pelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. *Green budgeting* tidak hanya memperhitungkan aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga menilai dampak lingkungan dari setiap langkah keuangan yang diambil oleh pemerintah atau organisasi.

Pendekatan *green budgeting* melibatkan penggunaan alat-alat kebijakan anggaran untuk mendukung tujuan kebijakan lingkungan dan iklim, seperti alokasi dana untuk proyek-proyek yang mendukung energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengendalian emisi gas rumah kaca, dan pengembangan infrastruktur hijau. Selain itu, *green budgeting* juga mencakup pemantauan dan pelaporan terkait dampak lingkungan dari setiap kegiatan yang didanai oleh anggaran publik, sehingga memungkinkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Wang, dkk. 2023).

Dengan adanya *green budgeting*, kebijakan-kebijakan pelestarian lingkungan tidak hanya menjadi wacana retorik, tetapi juga diterjemahkan ke dalam tindakan konkret yang dapat memperbaiki kualitas lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh (Eckert & ka, 2021). Dengan demikian, *green budgeting* menjadi penting dalam akan sarana yang efektif bagi pemerintah untuk memprioritaskan an lingkungan dalam agenda pembangunan nasional.



Gagasan *green budgeting* dapat didukung oleh sistem desentralisasi pemerintahan baik di negara maju maupun berkembang (Wang, 2023). Sistem desentralisasi pemerintahan mendelegasikan kewenangan anggaran dari pusat kepada kepala daerah. Sehingga kebijakan dan alokasi anggaran yang lebih terukur dapat disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan setempat secara lebih efektif. Dengan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat dan lingkungan, keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan dapat diambil dengan memperhitungkan kondisi lokal dan aspirasi masyarakat setempat.

Salah satu contoh negara anggota OECD yang mengimplementasikan *green budgeting* adalah Jerman (Russel & Benson, 2014). Salah satu inisiatif utama yang diambil oleh Jerman adalah pembentukan *Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, and Nuclear Safety* (BMU). Kementerian ini bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kebijakan lingkungan di tingkat federal dan memastikan bahwa aspek lingkungan dipertimbangkan dalam setiap keputusan anggaran. Melalui BMU, Jerman telah mengembangkan berbagai program dan insentif untuk mendorong penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Selain langkah-langkah di tingkat federal, pemerintah Jerman juga telah mendorong penerapan konsep *green budgeting* di tingkat regional dan lokal. Berbagai pemerintah daerah di Jerman telah mengembangkan strategi anggaran yang memperhitungkan aspek lingkungan dan mengarahkan investasi ke sektor-sektor yang mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti transportasi umum, energi terbarukan, dan manajemen limbah. Implementasi konsep *green budgeting*



man menunjukkan komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa anggaran pemerintah mendukung tujuan-tujuan lingkungan yang berkelanjutan.

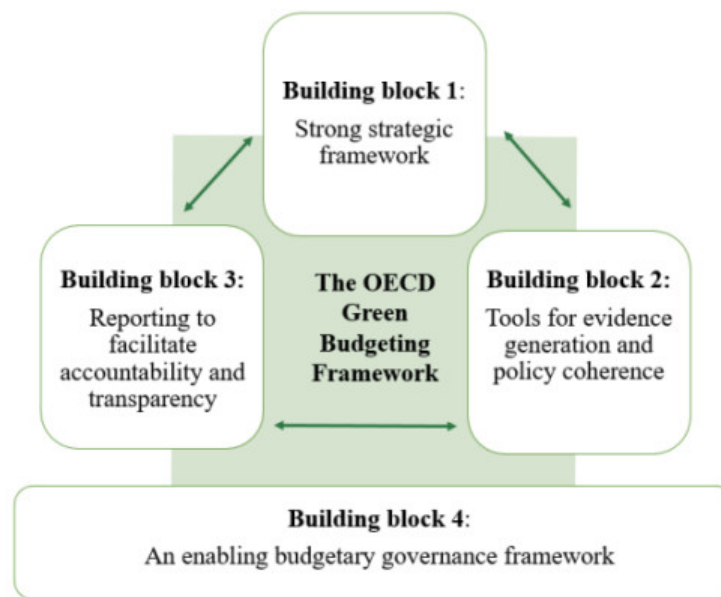
2.2 OECD *Green budgeting Framework*

Pada tahun 2017 organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) mencetuskan suatu kerangka kerja strategis implementasi *green budgeting* yang bernama *Paris Collaborative on Green budgeting - OECD Green budgeting Framework*. OECD didirikan pada tahun 1961 dengan visi untuk menciptakan sebuah forum di mana negara-negara dapat bekerja sama untuk menyelesaikan tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang kompleks. Tujuannya adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan taraf hidup, dan pembangunan yang inklusif di seluruh dunia. OECD bertujuan untuk menggalang kebijakan yang efektif dan inovatif dengan memanfaatkan penelitian, analisis data, dan pengalaman praktis dari negara-negara anggotanya.

OECD terdiri dari 38 negara anggota, yang meliputi sebagian besar negara-negara maju di dunia, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, dan Australia, serta sejumlah negara anggota lainnya dari berbagai belahan dunia. Selain itu, OECD juga menjalin kemitraan dengan negara-negara non anggota, organisasi internasional, dan sektor swasta untuk mencapai tujuannya dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pembangunan sosial yang inklusif dan perlindungan lingkungan.

Kerangka kerja yang dilahirkan oleh OECD merupakan pondasi yang efektif bagi negara anggota dalam menerapkan kebijakan *green budgeting* baik pada tingkat pusat maupun daerah. Kerangka kerja tersebut terdiri empat blok utama, yang dapat dilihat pada gambar berikut ini:





Gambar 2.1 *Building Blok OECD Green Budgeting Framework*

Dari gambar diatas, diketahui bahwa *building block* pertama adalah kerangka kerja strategis yang kuat (*Strong Strategic Framework*). Blok tersebut menekankan pentingnya prioritas dan tujuan strategis pemerintah yang berkaitan dengan lingkungan dan perubahan iklim ditetapkan dengan jelas untuk membantu merumuskan perencanaan fiskal. Misalnya, strategi nasional terkait perubahan iklim atau lingkungan yang menetapkan prioritas dan tujuan yang relevan. Strategi dan rencana ini membantu mengarahkan keputusan terkait pajak dan pengeluaran sehingga mereka dapat mendukung pencapaian tujuan nasional.

Blok tersebut menggarisbawahi pentingnya penegasan yang jelas mengenai prioritas dan tujuan strategis pemerintah terkait dengan lingkungan dan perubahan iklim dalam konteks perencanaan anggaran. Penetapan ini perlu dilakukan melalui penyusunan strategi nasional yang secara rinci menjabarkan prioritas dan tujuan terkait isu lingkungan dan perubahan iklim. Misalnya, strategi nasional terkait perubahan iklim atau lingkungan yang merumuskan prioritas dan tujuan relevan. Strategi dan rencana semacam itu penting karena mereka menjadi



panduan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan pajak dan pengeluaran yang mendukung pencapaian tujuan nasional terkait dengan lingkungan dan perubahan iklim.

Dengan adanya strategi dan rencana yang jelas ini, pemerintah dapat membuat keputusan anggaran yang terinformasi dan terarah. Mereka dapat mengalokasikan sumber daya ke sektor - sektor yang mendukung tujuan lingkungan dan perubahan iklim, seperti investasi dalam energi terbarukan, pengelolaan limbah, atau pengendalian emisi. Selain itu, pengaturan prioritas dan tujuan ini juga membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana kebijakan fiskal dapat memberikan dampak terbesar dalam mencapai tujuan lingkungan yang diinginkan

Kemudian pada *building blok* kedua, menekankan kebutuhan terhadap alat-alat (*tools*) yang dapat digunakan untuk membantu mengumpulkan bukti tentang bagaimana langkah-langkah anggaran memengaruhi tujuan lingkungan dan iklim. Setiap negara anggota OECD diharapkan dapat mengembangkan bukti yang didasarkan pada kerangka kerja yang mencakup:

Green budgeting tagging - Mengklasifikasikan langkah-langkah anggaran sesuai dengan dampaknya terhadap lingkungan dan/atau iklim. Proses pengklasifikasian langkah-langkah anggaran ini membantu pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk mendukung tujuan lingkungan dan iklim nasional. Dengan memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana setiap langkah anggaran mempengaruhi lingkungan, pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam perencanaan anggaran serta memastikan bahwa dana publik dialokasikan secara efisien untuk proyek-proyek yang

itaskan perlindungan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim.

Environmental impact assessments - Mewajibkan penilaian dampak lingkungan untuk menyertai langkah-langkah anggaran yang baru. *Environmental*



impact assessments adalah proses di mana setiap langkah anggaran yang baru harus secara wajib dinilai terhadap dampaknya terhadap lingkungan sebelum diimplementasikan. Dengan mewajibkan penilaian ini, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap keputusan anggaran yang diambil mempertimbangkan konsekuensi terhadap lingkungan dan meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi. Melalui proses ini, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi masalah lingkungan sebelum mereka terjadi, mengambil tindakan pencegahan yang sesuai, dan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan berada dalam batas-batas yang berkelanjutan. Ini membantu menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan, serta mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh.

Ecosystem services, including carbon, pricing - Menetapkan harga pada eksternalitas lingkungan, seperti emisi gas rumah kaca, sering kali melalui pajak dan sistem perdagangan emisi, untuk memfasilitasi pencapaian tujuan lingkungan dan iklim nasional. Hal tersebut dapat dilakukan melalui berbagai instrumen kebijakan, seperti pajak karbon atau sistem perdagangan emisi, yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong penggunaan sumber daya yang lebih berkelanjutan. Dengan menetapkan harga pada eksternalitas lingkungan, pemerintah dapat memberikan insentif kepada produsen dan konsumen untuk mengurangi polusi dan mendorong inovasi teknologi ramah lingkungan. Selain itu, pendapatan yang diperoleh dari harga karbon dapat digunakan untuk mendukung investasi dalam proyek-proyek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta untuk membiayai program-program konservasi lingkungan dan restorasi ekosistem. Dengan demikian, pricing ekosistem, termasuk karbon,



menjadi salah satu alat yang efektif dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan lingkungan dan iklim nasional.

Green perspective to spending review - Memasukkan pertimbangan dampak tindakan terhadap tujuan lingkungan dan iklim nasional di samping pertimbangan efisiensi. Dalam konteks tersebut, bukan hanya efisiensi penggunaan anggaran yang menjadi fokus, tetapi juga bagaimana kebijakan dan program yang didanai oleh anggaran tersebut akan mempengaruhi lingkungan dan iklim. Dengan menerapkan perspektif hijau dalam peninjauan pengeluaran, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan juga berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan lingkungan, seperti mengurangi emisi gas rumah kaca, melestarikan biodiversitas, atau mempromosikan penggunaan energi terbarukan. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperhitungkan aspek lingkungan dan iklim dalam setiap keputusan anggaran, sehingga menciptakan kesinambungan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk secara efektif mengarahkan sumber daya ke arah yang mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Green perspective in performance setting - Mengintegrasikan tujuan kinerja yang terkait dengan tujuan nasional terkait dengan tujuan lingkungan dan iklim. Dalam hal ini, tujuan kinerja yang ditetapkan untuk lembaga pemerintah atau program-program tertentu tidak hanya mencakup pencapaian target ekonomi atau sosial, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan iklim. Dengan mengadopsi perspektif hijau dalam penentuan tujuan kinerja, pemerintah dapat memastikan bahwa keberhasilan suatu kegiatan atau program tidak hanya diukur berdasarkan parameter ekonomi atau sosial saja, tetapi juga dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan iklim. Misalnya, sebuah



pemerintah untuk meningkatkan produksi energi dapat memiliki tujuan untuk meningkatkan output energi secara keseluruhan, namun juga harus ditungkan dampaknya terhadap emisi gas rumah kaca atau penggunaan

sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dengan demikian, lembaga pemerintah atau program-program tersebut akan dinilai berdasarkan kemampuannya untuk mencapai tujuan kinerja yang seimbang antara aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan iklim.

Kemudian pada *building block* ketiga, mengharuskan adanya pelaporan yang dapat memfasilitasi akuntabilitas dan transparansi. Pelaporan yang memadai kepada pemangku kepentingan yang relevan, seperti parlemen dan masyarakat sipil adalah kunci untuk memudahkan pengawasan terhadap kualitas dan dampak dari *green budgeting*. Sebagai contoh, salah satu alat utama dalam pelaporan adalah pernyataan *green budgeting* yang disertakan dalam anggaran. Pernyataan ini membantu memberikan gambaran menyeluruh tentang sejauh mana anggaran tersebut diselaraskan dengan tujuan-tujuan ramah lingkungan dalam periode anggaran tertentu. Dokumen semacam itu dapat digunakan oleh pemangku kepentingan, termasuk parlemen dan warga negara untuk memberikan masukan dan melakukan pembahasan yang lebih efektif terhadap anggaran.

Pada *building blok* keempat, negara anggota diharapkan menerapkan tata kelola anggaran yang mendukung penerapan *green budgeting*. Kerangka kerja anggaran moderen harus menyediakan lingkungan yang kuat untuk *green budgeting*. Hal tersebut mencakup kerangka kerja anggaran yang menghubungkan perencanaan strategis dan penganggaran, proses anggaran berbasis hasil dan bukti, serta keterlibatan erat dengan parlemen dan masyarakat sipil. Penerapan *green budgeting* juga didukung oleh kepemimpinan politik yang kuat, peran dan tanggung jawab yang jelas di dalam pemerintahan, urutan pelaksanaan yang dirancang dengan baik, sistem internal yang sesuai dengan

serta pengembangan kapasitas dan keahlian di kalangan pegawai negeri. ga harus koheren dengan inisiatif anggaran lainnya, seperti anggaran rder.



2.3 Analisis Konten terhadap *Green Budgeting Policy*

Penelitian ini secara khusus menggunakan metode analisis konten karena memungkinkan untuk secara sistematis menganalisis dan menggali makna dari berbagai dokumen terkait, seperti dokumen perencanaan, kebijakan anggaran, laporan keuangan, dan pernyataan resmi pemerintah. Metode analisis konten ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola, tren, dan isu-isu kunci yang terkait dengan implementasi *green budgeting* dalam konteks yang berbeda. Selain itu, dengan pendekatan ini, peneliti dapat secara mendalam menjelajahi dokumen-dokumen tersebut untuk memahami pendekatan dan strategi yang digunakan oleh pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk program-program lingkungan.

Metode analisis konten, seperti yang dijelaskan oleh Krippendorff (2004), merupakan suatu teknik yang memungkinkan peneliti untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis, dan generalis. Dalam konteks ini, objektif berarti bahwa proses identifikasi dan analisis dilakukan sesuai dengan aturan atau prosedur tertentu yang, jika diikuti oleh peneliti lain, dapat menghasilkan kesimpulan yang serupa.

Dengan kata lain, metode ini mengacu pada upaya untuk menafsirkan dan memahami pesan-pesan yang terkandung dalam dokumen atau konten tertentu secara obyektif, tanpa adanya bias atau interpretasi yang berlebihan. Pendekatan sistematis dalam metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola yang relevan, tren, atau tema-tema yang muncul dalam materi yang dianalisis, sehingga memfasilitasi proses pengambilan kesimpulan yang dapat

n secara lebih luas atau generalis. Dengan demikian, metode analisis memberikan kerangka kerja yang kokoh dan terstandarisasi untuk menangkap dan memahami berbagai aspek dari pesan atau konten yang diteliti.



Dalam penelitian ini, metode analisis konten yang digunakan diadopsi dari metode yang dijelaskan oleh Krippendorff, yang terdiri dari : Analisis Isi Pragmatik (*Pragmatic Content Analysis*), yaitu prosedur memahami teks dengan mengklasifikasikan tanda menurut sebab atau akibatnya yang mungkin timbul (misalnya penghitungan berapa kali suatu kata ditulis atau diucapkan, yang dapat mengakibatkan munculnya sikap suka atau tidak suka terhadap sebuah rezim pemerintahan).

Analisis Isi Semantik (*Semantic Content Analysis*), yakni prosedur yang mengklasifikasikan tanda menurut maknanya. Misalnya, menghitung berapa kali kata demokrasi dijadikan sebagai rujukan sebagai salah satu pilihan sistem politik yang dianut oleh sebagian besar masyarakat dunia. Atau, misalnya yang lain, berapa kali kata Indonesia disebut oleh Obama sebagai rujukan contoh negara dengan keragaman suku, budaya dan agama, yang mampu mempersatukan semuanya dalam bingkai negara kesatuan.

Analisis Sarana Tanda (*Sign-Vehicle Analysis*) merupakan suatu prosedur dalam analisis konten yang digunakan untuk memahami teks atau pesan dengan cara menghitung frekuensi atau keberadaan suatu elemen tertentu, seperti kata-kata, frase, atau konsep-konsep kunci, dalam materi yang dianalisis. Dalam konteks penelitian, analisis semacam ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam teks serta mengevaluasi sejauh mana suatu topik atau tema dibahas. Sebagai contoh, dalam sambutan Presiden Obama saat berkunjung ke Indonesia, peneliti dapat menggunakan Analisis Sarana Tanda untuk menghitung berapa kali kata-kata yang terkait dengan Indonesia muncul dalam pidato tersebut. Hal ini membantu dalam memahami

nana Presiden Obama menekankan atau membahas isu-isu yang dengan Indonesia dalam kunjungannya. Dengan demikian, Analisis



Sarana Tanda memberikan kerangka kerja yang terstruktur dan terukur untuk menggali makna dan pesan yang terkandung dalam teks atau konten tertentu.

Penggunaan analisis konten dalam penelitian kebijakan anggaran telah menjadi praktik umum bagi para peneliti dalam berbagai konteks. Sejumlah penelitian terdahulu telah menggunakan pendekatan ini untuk menggali isu-isu spesifik dalam alokasi anggaran pemerintah. Sebagai contoh, Naciti dan rekan-rekan (2023) memusatkan perhatian pada kesetaraan gender dalam alokasi anggaran pemerintah, sementara Polzer (2023) meneliti kebijakan pengarusutamaan gender dalam kebijakan anggaran. Davidson dan Ward (2022) mengeksplorasi kebijakan anggaran pemerintah setelah resesi besar di Amerika Serikat, sementara penelitian lainnya telah menginvestigasi aspek-aspek lain dari kebijakan anggaran. Dalam konteks *green budgeting*, Testa dan rekan-rekannya (2023) memeriksa penerapan *green budgeting* pada dokumen pengadaan publik di lingkungan pemerintahan. Dengan demikian, pendekatan analisis konten telah terbukti bermanfaat dalam memahami dinamika dan implikasi kebijakan anggaran, dan hal ini menjadi landasan yang kokoh bagi penelitian ini.

2.4 *Strategy Management Accounting (SMA)*

Strategic Management Accounting (SMA) muncul sebagai pengembangan dari konsep akuntansi manajemen tradisional yang bertujuan untuk memperluas ruang lingkup informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan strategis organisasi. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh Bromwich (1990) yang menyatakan bahwa akuntansi manajemen strategis merupakan penyediaan dan analisis informasi akuntansi manajemen yang tidak hanya mencakup kondisi

organisasi, tetapi juga faktor-faktor eksternal seperti pesaing, pelanggan, dinamika pasar dan lingkungan. Dalam konteks pemerintahan, pendekatan



ini mulai mendapatkan perhatian luas karena dapat memperkaya kapasitas organisasi publik dalam menyusun kebijakan yang adaptif dan berbasis data.

Seiring dengan berkembangnya isu keberlanjutan global dan meningkatnya tekanan terhadap pemerintahan untuk menunjukkan tanggung jawab lingkungan, muncul kebutuhan akan pendekatan penganggaran yang tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan ekologis. *Green budgeting* kemudian hadir sebagai pendekatan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam seluruh siklus anggaran publik, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. OECD (2020) menekankan bahwa *green budgeting* merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa komitmen lingkungan tercermin dalam proses fiskal dan kebijakan pembangunan.

Dalam kaitannya dengan *green budgeting*, *strategic management accounting* (SMA) memainkan peran penting sebagai kerangka kerja analitis yang mendukung integrasi antara strategi fiskal dan tujuan lingkungan hidup. Dengan karakteristiknya yang menekankan pada informasi strategis, *strategic management accounting* (SMA) memungkinkan pemerintah untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari keputusan anggaran terhadap lingkungan hidup dan sosial masyarakat. Melalui pendekatan ini, penganggaran tidak lagi dipahami semata sebagai alokasi sumber daya secara administratif, tetapi sebagai alat strategis dalam membentuk arah pembangunan yang berkelanjutan.

Penerapan *strategic management accounting* (SMA) dalam konteks *green budgeting* mencerminkan transisi dari pendekatan anggaran berbasis input menuju pendekatan yang berorientasi pada hasil dan nilai jangka panjang.

Informasi yang dikumpulkan tidak hanya mencakup biaya-biaya langsung dan keuangan, melainkan juga mencakup data yang berkaitan dengan energi, emisi karbon, dampak terhadap ekosistem, efisiensi sumber daya, dan risiko lingkungan. Dalam hal ini, *strategic management accounting*



(SMA) mendorong terciptanya sistem penganggaran yang lebih holistik dan terintegrasi dengan kebijakan strategis pembangunan berkelanjutan.

Secara metodologis, pendekatan ini juga mendukung pengembangan kerangka pengukuran kinerja yang lebih inklusif melalui pengembangan indikator kinerja hijau. Indikator tersebut memungkinkan organisasi publik untuk menilai sejauh mana kebijakan fiskal mendukung tujuan-tujuan lingkungan. Melalui integrasi informasi strategis ini, *strategic management accounting* (SMA) menjadi sarana penting dalam membangun legitimasi kebijakan anggaran yang tidak hanya berbasis pada efisiensi, tetapi juga responsif terhadap tuntutan ekologis dan sosial.

Strategic Management Accounting (SMA) menyediakan pendekatan yang memungkinkan adanya penyelarasan strategis antara kebijakan fiskal nasional atau daerah dengan komitmen lingkungan yang lebih luas, termasuk agenda pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) dan kesepakatan internasional seperti *Paris Agreement*. Penggunaan informasi strategis ini membantu organisasi sektor publik dalam merancang program dan intervensi fiskal yang tidak hanya efektif dari sisi anggaran, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan secara sistemik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *strategic management accounting* (SMA) dan *green budgeting* memiliki hubungan yang saling memperkuat. SMA menyediakan pondasi konseptual dan metodologis bagi pengembangan *green budgeting* sebagai strategi fiskal berkelanjutan. Sebaliknya, penerapan *green budgeting* memperkaya ruang lingkup praktik SMA di sektor publik. Integrasi kedua pendekatan ini membuka peluang bagi pemerintah,

di tingkat daerah untuk membangun sistem penganggaran yang lebih terintegrasi terhadap tantangan masa depan, berbasis data, serta berorientasi pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.





Optimized using
trial version
www.balesio.com